



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Tahun Anggaran 2023



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK**

JL. D.I Panjaitan No. 7, Niti Mandala Renon - Denpasar  
Telp. 0361 - 225859 | Fax. 0361 - 227810

## KATA PENGANTAR

Puja pengastuti dan angayubagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2023 dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023. Laporan ini menyajikan informasi tentang target dan pencapaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan untuk peningkatan kinerja serta penilaian kinerja di tahun yang akan datang.

Denpasar, 15 Januari 2024

Kepala Dinas,



**Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.**

Pembina Utama Muda / (IV/c)

NIP. 19680531 199703 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Gambaran Umum .....	2
1.3. Aspek Strategis.....	5
1.4. Landasan Hukum.....	6
1.5. Tujuan.....	9
1.6. Kekuatan Sumber Daya Yang Ada.....	10
1.7. Sistematika Penyajian.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	15
2.2. Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2023.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.....	27
3.2. Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali .....	31
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	70
3.4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	76
3.5. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.....	88
3.6. Inovasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.....	91
BAB IV PENUTUP	
4.1. Tinjauan Umum Keberhasilan .....	93
4.2. Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja .....	93
4.3. Saran dan Rekomendasi.....	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di tengah tuntutan global akan transparansi, efektivitas, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya publik, sistem akuntabilitas kinerja menjadi landasan penting bagi lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi publik. Sistem akuntabilitas kinerja mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas kinerja organisasi atau lembaga. Hal ini tidak hanya melibatkan pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran, tetapi juga penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, dan dampak dari kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, sistem akuntabilitas kinerja tidak hanya menjadi alat untuk memastikan transparansi dan integritas dalam pengelolaan sumber daya, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

Laporan kinerja yang disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah bentuk pelaksanaan kinerja selama tahun 2023 dan merupakan penjabaran dari tugas pokok yang telah ditetapkan sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2023. Laporan Kinerja juga merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam rangka

memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada pasal 3 ayat (1) point d.5. disebutkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

Agar mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang telah dianggarkan melalui APBD/P-APBD tahun 2023 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2018 s/d 2023.

## **1.2 Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali.**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pada Lampiran V disebutkan bahwa tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas

dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas, dan
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah terdiri dari 1 unit eselon II, 8 unit eselon III (terdiri dari 1 sekretariat, 5 bidang dan 2 UPTD) 1 unit eselon IV serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai berikut:



### **1.3 Aspek Strategis**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarkan informasi pembangunan dan pemerintahan yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sesuai fungsi yakni sebagai penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di daerah Bali.

Permasalahan utama yang dihadapi pemerintah pada era digital saat ini adalah belum maksimalnya pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan serta masifnya penyebaran berita bohong/ ujaran kebencian oleh masyarakat. Permasalahan utama tersebut bila ditinjau dari berbagai aspek dapat dipetakan dalam isu strategis sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya penyebaran informasi program dan kebijakan pemerintah;
2. Belum maksimalnya keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat;
3. Kurangnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan secara elektronik;

4. Rendahnya pengolahan, analisis data dan informasi sektoral;  
dan
  5. Rendahnya pengamanan data dan informasi pemerintah
- Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, antara lain:
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:
    - a. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak;
    - b. Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi);
    - c. Meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
    - d. Pengendalian bandwidth dan pendistribusian ke Perangkat Daerah
    - e. Pengelolaan dan Pengembangan Data Center
  3. Meningkatkan kualitas keamanan data dan informasi pemerintah;
  4. Meningkatkan Ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas.

#### **1.4 Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tahun 2023 disusun dengan landasan hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871)
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- m. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- n. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- o. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
- p. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  - s. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
  - t. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - u. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
  - v. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
  - w. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor

25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

### 1.5 Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selama tahun 2023. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 1.6 Kekuatan Sumber Daya Yang Ada

#### 1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebanyak 247 orang dengan rincian sebagai berikut :

##### a. Komposisi Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	69 orang	(27,94%)
2	Non ASN	178 orang	(72,06%)
	<b>Jumlah</b>	<b>247 orang</b>	<b>(100%)</b>

b. Komposisi Jabatan PNS

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	8 orang	(11,59%)
2	Jabatan Fungsional	27 orang	
	Arsiparis Ahli Madya	1 Orang	(1,45%)
	Penerjemah Madya	2 Orang	(2,90%)
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1 Orang	(1,45%)
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	6 Orang	(8,70%)
	Pranata Komputer Ahli Muda	3 Orang	(4,35%)
	Sandiman Ahli Muda	1 Orang	(1,45%)
	Sandiman Ahli Pertama	1 Orang	(1,45%)
	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1 Orang	(1,45%)
	Statistisi Ahli Muda	2 Orang	(2,90%)
	Arsiparis Ahli Muda	1 Orang	(1,45%)
	Pranata Komputer Ahli Pertama	8 Orang	(11,59%)
3	Jabatan Fungsional Umum	34 Orang	(49,28%)
	<b>Jumlah</b>	<b>69 orang</b>	<b>(100%)</b>

c. Komposisi Eselon PNS :

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.a	1 orang	(1,45%)
2	Eselon III.a	6 orang	(8,70%)
3	Eselon IV.a	1 orang	(1,45%)
4	Jabatan Fungsional	27 orang	(39,13%)
5	Staf	34 orang	(49,27%)
	<b>Jumlah</b>	<b>69 orang</b>	<b>(100%)</b>

d. Komposisi Pendidikan PNS :

No.	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SD	orang	(0%)
2	SMP	orang	(0%)
3	SMA/SMK	4 orang	(5,80%)
4	D III/SARMUD	1 orang	(1,45%)
5	S 1	34 orang	(49,27%)
6	S2	29 orang	(42,03%)
7	S3	1 orang	(1,45%)
	<b>Jumlah</b>	<b>69 orang</b>	<b>(100%)</b>

e. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :

No.	Pendidikan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	Prosentase
1	SLTA	33 orang	(18,54%)
2	D I	1 orang	(0,56%)
3	D III	3 orang	(1,69%)
4	D IV	1 orang	(0,56%)
5	S 1	130 orang	(73,03%)
6	S2	10 orang	(5,62%)
	<b>Jumlah</b>	<b>178 orang</b>	<b>(100%)</b>

2. Sarana dan Prasarana

Jumlah aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
<b>1.</b>	<b><i>Golongan Tanah meliputi :</i></b>			
	a. Tanah	14	Bidang	
<b>2.</b>	<b><i>Golongan Peralatan dan Mesin meliputi :</i></b>			
	a. Peralatan Komputer	1.654	Buah	
	b. Alat-alat angkutan	30	Buah	Roda Empat dan Roda Dua

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
	c. Alat-alat bengkel dan alat ukur	2	Buah	
	d. Alat kantor dan rumah tangga	1.197	Buah	Barang-barang inventaris
	e. Alat studio dan komunikasi	336	Buah	Alat-alat studio
<b>3.</b>	<b><i>Golongan Gedung dan Bangunan meliputi :</i></b>			
	a. Bangunan gedung	16	Buah	Gedung perkantoran dan monumen
<b>4.</b>	<b><i>Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi :</i></b>			
	a. Instalasi	-	Buah	
	b. Jaringan	1	Buah	Jaringan telepon
<b>5.</b>	<b><i>Golongan Aset Tetap Lainnya meliputi :</i></b>			
	a. Buku dan perpustakaan	20	Paket	Judul buku yang ada diperpustakaan
	b. Barang dan corak kebudayaan	3	Buah	Pahatan kayu
<b>6.</b>	<b><i>Golongan Aset Lainnya meliputi :</i></b>			
	a. Lisensi	9	Buah	

### 1.7 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selama tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2023 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sebagai berikut:

- BAB I           Pendahuluan, menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali serta struktur organisasi.
- BAB II           Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tahun 2023 meliputi RPJMD Provinsi Bali.
- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- BAB III          Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023, menguraikan pengukuran kinerja 2023, analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- BAB IV          Penutup, menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

##### **A. Visi**

VISI: “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA MENUJU BALI ERA BARU Mengandung makna “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Skala-Niskala Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945”.

##### **B. Misi**

Visi: “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana memiliki 22 misi, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mengemban misi ke 22 yaitu Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti dan Murah.

##### **C. Tujuan dan Sasaran**

Pada tabel 6.3 (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Semesta Berencana Provinsi Tahun 2018-2023) dalam misi ke 22 (Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu yang Cepat, Pasti dan Murah) menetapkan 2 tujuan yaitu:

1. Tujuan 1: meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sasaran: meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik

2. Tujuan 2: meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Sasaran: terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan tersebut di atas sejalan dengan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yaitu TERWUJUDNYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, dengan Indikator: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tujuan, Sasaran dan Program yang ditetapkan pada Renstra 2018-2023 sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	71	74	77	93	93,2
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,35	1,72	2,18	2,52	3
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase data statistik sektoral yang valid	100	100	100	100	100
			Persentase keamanan transaksi data dan informasi publik	20	40	60	80	100
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50

#### D. Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2018-2023. Adapun Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sebagaimana tabel berikut:

<b>Tujuan/Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Penjelasan (alasan)</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Keterangan</b>
1	2	3	4	5	6
TERWUJUDNYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	Indeks Sistem Pemerintahtan Berbasis Elektronik (SPBE)	<p>Nilai penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.</p> <p>Nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator.</p> <p>Domain dan Aspek Penilaian :</p> <p>Domain 1: Kebijakan Internal SPBE dengan total bobot 17%.</p> <p>Domain 2: Tata kelola SPBE dengan total bobot 28%</p> <p>Domain 3: layanan SPBE dengan total bobot 55%.</p>	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
Terwujudnya pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayan informasi	Tingkat kepuasan diperoleh dari kuesioner kepada masyarakat.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	<p>1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.</p> <p>2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</p> <p>3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</p>
Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase keamanan transaksi data dan informasi	Jumlah transaksi data dan informasi yang diamankan dibagi dengan jumlah transaksi data dan informasi yang ada x 100%	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Meningkatnya ketersediaan data statistik yang berkualitas.	Persentase data statistik sektoral yang valid	Jumlah data statistik sektoral yang valid dibagi data yang tersedia x 100%	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

E. Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program Yang Ditetapkan Dalam Rencana Kerja 2023

Tujuan, Sasaran/program yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	93,2
			- Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	Indeks	81
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3
			- Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik	Aplikasi	25
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase data statistik sektoral yang valid	Persen	100
			- Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	Sektor	11
			Persentase keamanan transaksi data dan informasi publik	Persen	100
			- Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	OPD	38
			- Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	OPD	38
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin	82,50
			- Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	Dokumen	16
			- Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	Dokumen	75

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
			- Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	Bulan	12
			- Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Paket	3
			- Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Bulan	12
			- Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	Unit	539

#### F. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Lampiran perjanjian kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Satuan
Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik yang Efektif dan Efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	Indeks

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.887.473.021	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	40.009.778.752	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	408.375.273.985	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	773.875.680	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.154.942.992	APBD
	TOTAL	470.201.344.430	

#### G. Strategi Dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik  
 Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik  
 Strategi : Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah.
- Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan  
 Sasaran RPJMD : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Strategi : Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi.

Kebijakan : Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan.

Pada Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Telah ditetapkan 52 strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pada era digital saat ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut karena dalam proses pelaksanaannya tentu akan memanfaatkan sarana teknologi informasi. Didalam strategi tersebut secara khusus Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah berperan pada Strategi; Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak khususnya pada Kebijakan; Menjadikan wantilan Desa Adat sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point yang dilengkapi dengan Wifi gratis dan fasilitas pendukung seni budaya lainnya. Terkait dengan Strategi: Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan tentang keterbukaan informasi publik, secara mandiri juga melaksanakan kegiatan Kolaborasi Bali Era Baru *Smart Festival* dan pertunjukan rakyat. Untuk strategi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan publik dengan arah kebijakan Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar kab./kota di Provinsi Bali, sejak tahun 2022 telah dimulai pembangunan Taman Teknologi Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali yang berfungsi untuk

mengatasi terbatasnya jangkauan siaran televisi (*blank spot*) khususnya wilayah Buleleng dan sebagai daya tarik wisata dan pusat pertumbuhan perekonomian baru. Secara umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mendukung strategi Perangkat Daerah lainnya dibidang teknologi informasi. Dilatarbelakangi dari Isu Strategis/Masalah Strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yaitu:

- a. Belum maksimalnya penyebarluasan informasi Program dan Kebijakan Pemerintah;
- b. Belum maksimalnya keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat;
- c. Kurangnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan secara elektronik;
- d. Rendahnya pengolahan, analisis data dan informasi sektoral; dan
- e. Rendahnya pengamanan data dan informasi.

Maka Strategi yang ditempuh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan tupoksi dalam rangka peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi;
- b. Mengembangkan infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- c. Meningkatkan layanan informasi;
- d. Meningkatkan pengelolaan dan penyebarluasan informasi yang berkualitas melalui seluruh saluran media;
- e. Mengembangkan data statistik sektoral yang akurat;
- f. Peningkatan kualitas sarana prasarana berbasis IT dalam rangka keamanan transaksi data dan informasi public;
- g. Mempercepat penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Bali Smart Island;

- h. Melaksanakan Layanan Free Wifi di Desa Adat, Objek Wisata, dan Puskesmas untuk mendorong terpenuhinya penyediaan Infrastruktur dasar, berupa jaringan fiber optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi Bali untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur terintegrasi serta terkoneksi antar-wilayah;
- i. Memberikan layanan wifi gratis kepada SMA/SMK/SLBN se Bali dalam rangka pengembangan dan akselerasi kompetensi SDM.

Arah Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan SOP / standar pelayanan informasi;
- b. Mengelola keberlangsungan perangkat jaringan sistem informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- c. Melakukan kerjasama dengan media massa, LSM dan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas data sektoral melalui koordinasi dan Kerjasama antar berbagai sektor dalam rangka penyediaan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kajian;
- e. Meningkatkan kualitas aparatur dan standarisasi perangkat dalam rangka meningkatkan keamanan dan transaksi data;
- f. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerjasama dengan media massa dalam rangka memperkuat watak dan jati diri masyarakat Bali sebagai satu kesatuan;
- g. Menyiapkan regulasi dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik;
- h. Mengupayakan penyediaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka

meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;

## **2.2 Program Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2023**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan:
  1. Perencanaan. Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi. Melalui program dan kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata pemanfaatan media secara sehat serta mampu melindungi hak masyarakat maupun lembaga pemerintah dan swasta dalam memenuhi kebutuhan informasi.
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi. Melalui program/kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan layanan infrastruktur TIK dalam menunjang kinerja aparatur dan pelayanan sehingga dapat menciptakan kelancaran pelaksanaan tugas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), SMA/SMK dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan pemerintah Provinsi Bali.

- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi. Program ini bertujuan untuk melakukan pencatatan data dan informasi yang terstruktur yang akan mendukung proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Program ini menjadi dasar untuk melakukan penyusunan analisa statistik sektoral yang mencakup 11 sektor yaitu sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM, yang akan dipublikasi secara luas.
- e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan 2 (dua) kegiatan yakni Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi. Program/kegiatan ini memberikan standarisasi keamanan data, sehingga informasi pelaksanaan administrasi perkantoran bisa terlaksana secara lancar. Hal ini dilandaskan pada tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali atas keamanan data dan informasi yang penting.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Bali**

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan program kegiatan di tahun 2023 maka Laporan Kinerja tahun 2023 membahas tentang pencapaian hasil-hasil berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Untuk mengetahui hasil yang diperoleh maka dilakukan pengukuran kinerja sehingga dapat dinilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Adapun Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Diskominfo Prov. Bali

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$	7	8	$9=8/7*100$
1	TERWUJUDNYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,52	3,68	146,03	3	4,07	135,67
a.	Terwujudnya pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas							
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93	97,72	105,08	93,2	94,32	101,20
		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82	80,59	98,28	82,50	*)	*)
b.	Meningkatnya ketersediaan data statistik yang berkualitas.	Persentase data statistik sektoral yang valid	100	100	100	100	100	100
c.	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase keamanan transaksi data dan informasi	80	80	100	100	100	100

Keterangan: \*) penilaian dilakukan tahun 2024

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,35	1,72	2,18	2,52	3	1,35	1,72	3,68	3,68	4,07
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	71	74	92,50	93	93,20	71	85,87	93,62	97,72	94,32
		Nilai evaluasi manajemen kinerja	80,50	81	81,50	82	82,50	80,50	80,38	80,43	80,59	*)
2	Meningkatnya ketersediaan data statistik yang berkualitas.	Persentase data statistik sektoral yang valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase keamanan transaksi data dan informasi	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%

Keterangan: \*) penilaian dilakukan tahun 2024

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	TERWUJUDNYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,07	3	135,67
a.	Terwujudnya pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas				
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	94,32	93,2	101,20
		Nilai evaluasi manajemen kinerja	*)	82,50	*)
b.	Meningkatnya ketersediaan data statistik yang berkualitas.	Persentase data statistik sektoral yang valid	100	100	100
c.	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase keamanan transaksi data dan informasi	100	100	100

Keterangan: \*) penilaian dilakukan tahun 2024

### 3.2 Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali

Tujuan Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik yang Efektif dan Efisien dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menargetkan indeks sebesar 3. Pada tahun 2022 target indeks SPBE sebesar 2,52 dan karena tahun 2021 mendapat nilai tertinggi untuk tingkat provinsi. Oleh sebab itu pada tahun 2022 penilaian SPBE tidak dilakukan dan nilai Indeks SPBE Provinsi Bali tetap 3,68. Target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 3 telah tercapai bahkan melampaui target dengan nilai 4,07. Pada pemeringkatan nilai, indeks 4,07 termasuk peringkat dengan kategori sangat baik karena berada di level 3,5 – 4,2. Kategori indeks SPBE sesuai ketentuan disajikan sesuai tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kategori indeks SPBE

No.	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 - 5	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Tercapainya target yang telah ditetapkan tersebut tidak terlepas dari peranan perangkat daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan utamanya lancarnya pelaksanaan program-program pendukung dan prioritas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Pelaksanaan program diuraikan sbb:

1. Program pengelolaan aplikasi informatika
  - a. Pelayanan Jaringan Internet dan Intranet

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki perangkat jaringan internet terintegrasi untuk menyediakan layanan akses internet untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Provinsi Bali. Sebagai Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* dalam bidang Teknologi Informasi maka dibutuhkan konektivitas yang tinggi dan layanan internet untuk menunjang kinerja pegawai. Pada tahun 2023 pengadaan layanan internet IP transit internasional pada Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali adalah sebesar 4 Gbps dan digunakan untuk pelayanan internet yang terintegrasi. Perangkat daerah yang mendapatkan layanan internet sesuai dengan Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Daftar Perangkat Daerah Penerima Layanan Internet

No	Nama Perangkat Daerah	Koneksi Backbone	Maksimal Alokasi Bandwidth	Satuan
1	Sekretariat Daerah	Fiber Optik	1000	Mbps
2	Sekretariat DPRD	Fiber Optik	1000	Mbps
3	Inspektorat	Fiber Optik	1000	Mbps
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga	Fiber Optik	1000	Mbps
5	Dinas Kesehatan	Fiber Optik	1000	Mbps
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Fiber Optik	1000	Mbps
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fiber Optik	1000	Mbps
8	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Fiber Optik	1000	Mbps
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Metro Link (FO)	200	Mbps
10	Dinas Perhubungan	Fiber Optik	1000	Mbps
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Fiber Optik	1000	Mbps
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Fiber Optik	1000	Mbps
13	Dinas Kebudayaan	Fiber Optik	1000	Mbps
14	Dinas Pariwisata	Fiber Optik	1000	Mbps
15	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Fiber Optik	1000	Mbps
16	Satuan Polisi Pamong Praja	Fiber Optik	1000	Mbps
17	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	Metro Link (FO)	100	Mbps
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Fiber Optik	1000	Mbps

No	Nama Perangkat Daerah	Koneksi Backbone	Maksimal Alokasi Bandwidth	Satuan
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Metro Link (FO)	100	Mbps
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	Metro Link (FO)	100	Mbps
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Fiber Optik	1000	Mbps
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fiber Optik	1000	Mbps
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Metro Link (FO)	100	Mbps
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fiber Optik	1000	Mbps
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Metro Link (FO)	200	Mbps
26	Badan Pendapatan Daerah	Fiber Optik	1000	Mbps
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Fiber Optik	1000	Mbps
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fiber Optik	1000	Mbps

Selain layanan internet kepada Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali juga memberikan layanan Wifi Gratis untuk SMAN/SMKN/SLBN se- Bali sebanyak 157 titik. Besar bandwidth yang dialokasikan untuk setiap titik adalah sebesar 50 mbps.

Tabel 3.6 Data Layanan Free Wifi di SMAN/SMKN/SLBN

No	Kab./Kota	Jumlah			
		SMA	SMK	SLB	Total
1	Denpasar	11	6	3	20
2	Badung	13	4	1	18
3	Gianyar	8	8	1	17
4	Tabanan	9	3	1	13
5	Bangli	5	9	1	15
6	Klungkung	8	2	1	11
7	Karangasem	10	7	1	18
8	Jembrana	7	5	1	13
9	Buleleng	17	13	2	32
<b>Jumlah</b>		<b>88</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	<b>157</b>

b. Pengelolaan/Pengembangan Aplikasi

Pengelolaan/pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik sejak tahun 2020 terpusat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Roadmap SPBE Provinsi Bali dan diperkuat dengan ditetapkannya SPBE Provinsi Bali melalui Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Aplikasi yang dibangun/dikembangkan pada tahun 2023 sebanyak 63 aplikasi untuk pelayanan kepada masyarakat dan pegawai pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Berbagai sistem aplikasi yang dikembangkan antara lain:

1. Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan

- a. Pengembangan Single Sign On Pemprov Bali  
(<https://sso.baliprov.go.id/>)



- b. Kantor Virtual  
(<https://kanal.baliprov.go.id/>)



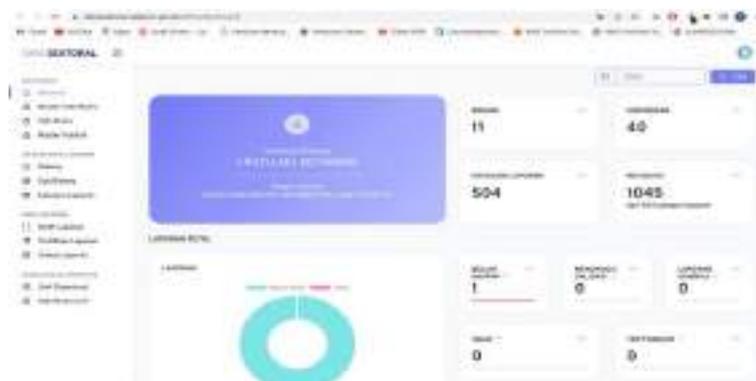
- c. Sistem Layanan Kepegawaian “SIMPEG”  
(<https://simpeg.baliprov.go.id/> )



- d. Sistem Absensi berbasis Artificial Intelligence “AI”  
(<https://hadir.baliprov.go.id/>)



- e. Sistem Pendataan Data Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota  
(<http://datasektoral.baliprov.go.id/>)



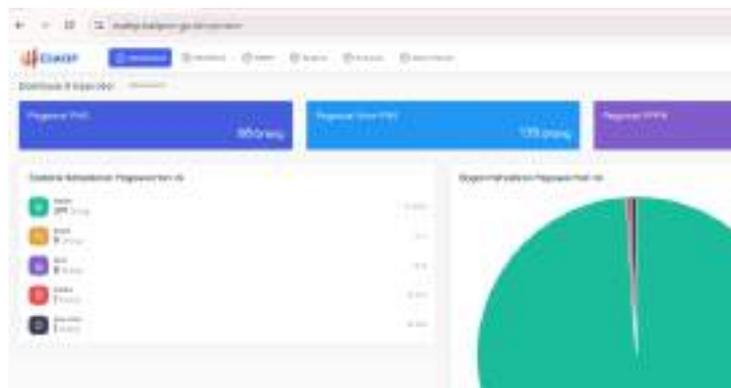
- f. Knowledge Based System “INSIGHT”  
(<https://insight.baliprov.go.id/>)



- g. Sistem Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Bali  
(<https://aset.baliprov.go.id/>)



- h. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “SAKIP”  
(<https://esakip.baliprov.go.id/>)



## 2. Sistem Informasi Publik

- a. Pengembangan Website Portal Provinsi Bali  
(<https://baliprov.go.id/>)



- b. Kantor Virtual Publik  
(<https://kanal.baliprov.go.id/publik/login>)



- c. Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali  
(<https://balisatudata.baliprov.go.id/>)



- d. Sistem Informasi Pelayanan Perikanan (SIMPELkan)  
(<https://simplkan.baliprov.go.id/>)



- e. Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis “SIGAPURA”  
(<https://sigapura.baliprov.go.id/>)



- f. Sistem Perizinan Elektronik “PRESTISE”  
(<https://prestise.baliprov.go.id/>)



- g. Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker)  
(<https://sisnaker.baliprov.go.id/>)



- h. Aplikasi EventID (<https://event.baliprov.go.id/>)



- i. Sistem Keuangan Desa Adat (Sikuat)  
(<https://sikuat.baliprov.go.id/>)



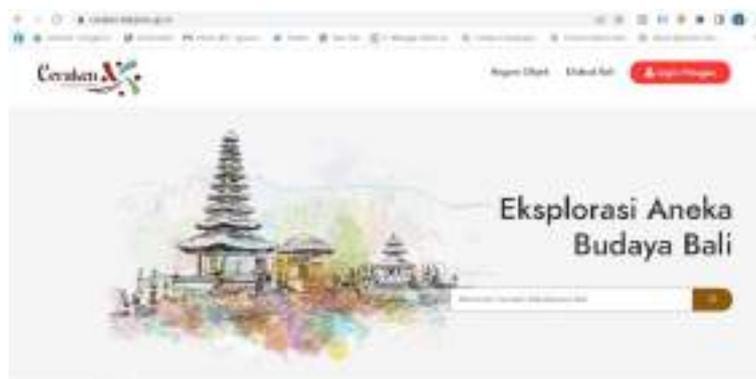
- j. Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (Jidhat)  
(<https://jidhat.baliprov.go.id/>)



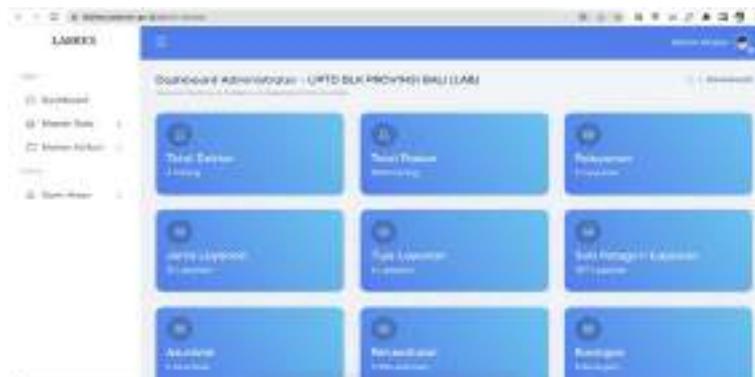
- k. Sensus Desa Adat  
(<https://sensusadat.baliprov.go.id/>)



- l. Ceraken Kebudayaan Bali  
(<https://ceraken.baliprov.go.id/>)



- m. Sistem Layanan Laboratorium Kesehatan (SISLAB)  
(<https://labkes.baliprov.dev>)



- n. SILEBAH (Sistem Informasi dan Pelayanan Online Pengujian Laboratorium Penyakit Hewan dan Bahan Pangan Asal Hewan)  
(<https://silebah.baliprov.go.id/>)



- o. Pameran Virtual Pembangunan Bali  
(<https://pameran.baliprov.go.id/>)



p. Virtual Pulaki (APP On Oculus Store)



q. VR Rindik (APP On Oculus Store)



Daftar aplikasi yang dibangun/dikembangkan adalah sesuai tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Daftar Aplikasi

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
1	Virtual Reality (VR) Pura Pulaki	Saat ini baru tersedia secara lokal di perangkat Oculus (VR) Diskominfo Provinsi Bali dan kedepannya akan dirilis secara resmi di Oculus Store
2	Virtual Reality (VR) Gamelan Tradisional Rindik, Kecek, dll	Saat ini baru tersedia secara lokal di perangkat Oculus (VR) Diskominfo Provinsi Bali dan kedepannya akan dirilis secara resmi di Oculus Store
3	Game Virtual Reality (VR) Nyomia Bhutakala	Saat ini baru tersedia secara lokal di perangkat Oculus (VR) Diskominfo Provinsi Bali dan kedepannya akan dirilis secara resmi di Oculus Store
4	Virtual Tour 360 Experience	<a href="https://pameran-360.baliprov.go.id/">https://pameran-360.baliprov.go.id/</a>
5	Augmented Reality (AR) Daerah Tujuan Wisata	<a href="https://var.baliprov.go.id/link-tree">https://var.baliprov.go.id/link-tree</a>

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
6	Augmented Reality (AR) Instagram Filter Bali Era Baru	<a href="https://var.baliprov.go.id/link-tree">https://var.baliprov.go.id/link-tree</a>
7	Sistem Informasi, Pendataan dan Kontribusi Wisatawan "LOVE BALI"	<a href="https://lovebali.baliprov.go.id/">https://lovebali.baliprov.go.id/</a> serta melalui aplikasi mobile melalui google play dan app store dengan nama "Love Bali"
8	Dashboard Monitoring Pimpinan Birokrasi Berdampak	<a href="https://balisatudata.baliprov.dev/leader/dashboard">https://balisatudata.baliprov.dev/leader/dashboard</a>
9	Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali	<a href="https://balisatudata.baliprov.go.id/">https://balisatudata.baliprov.go.id/</a>
10	Sistem Pendataan Data Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota	<a href="https://datasektoral.baliprov.go.id/">https://datasektoral.baliprov.go.id/</a>
11	Sistem Pengelolaan Data "CERAKEN" Kebudayaan Terpadu	<a href="https://ceraken.baliprov.go.id/">https://ceraken.baliprov.go.id/</a>
12	Knowledge Based System "INSIGHT"	<a href="https://insight.baliprov.go.id/">https://insight.baliprov.go.id/</a>
13	Sistem Single Sign On "SSO"	<a href="https://sso.baliprov.go.id/">https://sso.baliprov.go.id/</a>
14	Sistem Layanan Kepegawaian "SIMPEG"	<a href="https://simpeg.baliprov.go.id/">https://simpeg.baliprov.go.id/</a>
15	Kantor Virtual	<a href="https://kanal.baliprov.go.id/">https://kanal.baliprov.go.id/</a> serta melalui aplikasi mobile melalui google play dan app store dengan nama "Kantor Virtual Bali"
16	Sistem Absensi berbasis Artificial Intelligence "AI"	<a href="https://hadir.baliprov.go.id/">https://hadir.baliprov.go.id/</a> serta melalui aplikasi mobile melalui google play dan app store dengan nama "Absensi Pegawai Pemprov Bali"
17	Sistem Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Bali	<a href="https://aset.baliprov.go.id/">https://aset.baliprov.go.id/</a>
18	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "SAKIP"	<a href="https://esakip.baliprov.go.id/">https://esakip.baliprov.go.id/</a>
19	Sistem Strategi Penguatan Manajemen Resiko Berkualitas "SUPERMANKUAT"	<a href="https://supermankuat.baliprov.dev/">https://supermankuat.baliprov.dev/</a>
20	Sistem Pemantauan Internal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat "PETIEMAS"	<a href="https://petiemas.baliprov.go.id/">https://petiemas.baliprov.go.id/</a>
21	Layanan Smartlink	<a href="https://balikom.info/">https://balikom.info/</a>
22	Sistem Notifikasi Terintegrasi	<a href="https://notifikasi.baliprov.go.id/">https://notifikasi.baliprov.go.id/</a>

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
23	Sistem Pendataan Koperasi	<a href="https://koperasi.baliprov.go.id/">https://koperasi.baliprov.go.id/</a>
24	Sistem pendataan IKM dan UMKM	<a href="https://officeumkm.baliprov.go.id/">https://officeumkm.baliprov.go.id/</a>
25	Marketplace bagi Produk Koperasi, UMKM dan IKM Bali "MadeInBali"	<a href="https://madeinbali.baliprov.go.id/">https://madeinbali.baliprov.go.id/</a> serta melalui aplikasi mobile melalui google play dan app store dengan nama "Made in Bali"
26	Integrasi Pembayaran Layanan Aplikasi/ One Payment Gateway "SiPAY"	<a href="https://sipay.baliprov.go.id/">https://sipay.baliprov.go.id/</a>
27	Kantor Virtual Publik	<a href="https://kanal.baliprov.go.id/publik/">https://kanal.baliprov.go.id/publik/</a>
28	Pameran Virtual Pembangunan Bali	<a href="https://pameran.baliprov.go.id/">https://pameran.baliprov.go.id/</a>
29	Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis "SIGAPURA"	<a href="http://sigapura.baliprov.go.id/">http://sigapura.baliprov.go.id/</a>
30	Sistem Perizinan Elektronik "PRETISE"	<a href="https://prestise.baliprov.go.id/">https://prestise.baliprov.go.id/</a>
31	Permohonan Informasi Publik dalam Portal Bali Satu Data	: <a href="https://balisatudata.baliprov.go.id/">https://balisatudata.baliprov.go.id/</a> kemudian klik pada tombol "Permohonan Informasi"
32	Sistem Perpustakaan Digital "Pustaka Bali"	<a href="https://pustakabali.baliprov.go.id/">https://pustakabali.baliprov.go.id/</a>
33	Portal Layanan Belajar-Mengajar "BALIMELAJAH"	<a href="https://melajah.baliprov.dev/">https://melajah.baliprov.dev/</a>
34	Sistem Antrean Layanan Publik	<a href="https://antrean.baliprov.go.id/">https://antrean.baliprov.go.id/</a> serta melalui aplikasi mobile melalui google play dan app store dengan nama "Antrean"
35	Informasi Kegiatan Bulan Bung Karno	<a href="https://bulanbungkarno.baliprov.go.id/">https://bulanbungkarno.baliprov.go.id/</a>
36	Bali Media Centre "BMC" : Portal Berita, Survei, Konsultasi/HelpDesk, Kontak dan Informasi Publik lainnya	<a href="https://bmc.baliprov.go.id/">https://bmc.baliprov.go.id/</a> serta melalui aplikasi mobile melalui google play dan app store dengan nama "Bali Media Center"
37	Sistem Informasi Ketenagakerjaan "SISNAKER"	<a href="https://sisnaker.baliprov.go.id/">https://sisnaker.baliprov.go.id/</a>
38	Sistem Pelayanan Perikanan "SIMPELKAN"	<a href="https://simplkan.baliprov.go.id/">https://simplkan.baliprov.go.id/</a>
39	Layanan Bali Digital Festival	<a href="https://digifest.baliprov.go.id/">https://digifest.baliprov.go.id/</a>
40	Sistem Penyelenggaraan Event "EVENTID" : Registrasi, Absensi, Piagam Elektronik	<a href="https://event.baliprov.go.id/">https://event.baliprov.go.id/</a>

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
41	Layanan Pemanfaatan Aset	<a href="https://aset.baliprov.go.id/">https://aset.baliprov.go.id/</a>
42	Layanan Bug Bounty	<a href="https://bugbounty.baliprov.go.id/">https://bugbounty.baliprov.go.id/</a>
43	Sistem Keuangan Desa Adat "SIKUAT"	<a href="https://sikuat.baliprov.go.id/">https://sikuat.baliprov.go.id/</a>
44	Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat "JIDHAT"	<a href="https://jidhat.baliprov.go.id/">https://jidhat.baliprov.go.id/</a>
45	Sistem Sensus Desa Adat	<a href="https://sensusadat.baliprov.go.id/">https://sensusadat.baliprov.go.id/</a>
46	Sistem Informasi Krama Desa Adat "KRAMA"	<a href="https://krama.baliprov.go.id/">https://krama.baliprov.go.id/</a>
47	Sistem Manajemen Subak dan Subak Abian	<a href="https://subak.baliprov.dev/">https://subak.baliprov.dev/</a>
48	Sistem Kelembagaan Adat "SAGA"	<a href="https://saga.baliprov.dev/">https://saga.baliprov.dev/</a>
49	Integrasi Layanan Pengamanan Lingkungan Berbasis Desa Adat "SIPANDUBERADAT" : Panic Button – BMC – Trepti Bali	<a href="https://sipanduberadat.baliprov.dev/">https://sipanduberadat.baliprov.dev/</a>
50	Sistem Manajemen Aset Desa Adat "PADRUWEN"	<a href="https://aset.baliprov.go.id/">https://aset.baliprov.go.id/</a>
51	Sistem Manajemen Lembaga Usaha Milik Desa Adat "BUPDA"	<a href="https://aset.baliprov.go.id/">https://aset.baliprov.go.id/</a>
52	Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sehat "SIK-KBS"	<a href="https://sik-kbs.baliprov.go.id/">https://sik-kbs.baliprov.go.id/</a> serta melalui aplikasi mobile melalui google play dan app store dengan nama "Krama Bali Sehat"
53	Sistem Inventori "SIRI"	<a href="https://siri.baliprov.go.id/">https://siri.baliprov.go.id/</a>
54	Sistem Layanan Laboratorium Kesehatan	<a href="https://labkes.baliprov.go.id/">https://labkes.baliprov.go.id/</a>
55	Sistem Monitoring Pencegahan Kemiskinan dan Stunting	<a href="https://sigenting.baliprov.go.id">https://sigenting.baliprov.go.id</a>
56	Sistem Informasi dan Pelayanan Online Pengujian Laboratorium Penyakit Hewan dan Bahan Pangan Asal Hewan "SILEBAH"	<a href="https://silebah.baliprov.go.id/">https://silebah.baliprov.go.id/</a>
57	Pusat Investasi Kerthi Bali Sedhana	<a href="https://invest.baliprov.go.id/">https://invest.baliprov.go.id/</a>
58	Sistem Informasi Perumahan Terintegrasi	<a href="https://siputri.baliprov.go.id/">https://siputri.baliprov.go.id/</a>

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
59	Sistem Pengawasan dan Pelaporan Terintegrasi	<a href="https://siwalatri.baliprov.dev/">https://siwalatri.baliprov.dev/</a>
60	Sistem Pengelolaan Air Limbah	<a href="https://dsdp.baliprov.dev/">https://dsdp.baliprov.dev/</a>
61	Sistem Pengelolaan Data Penangkaran Anjing Kintamani	<a href="https://penangkaran.baliprov.dev/">https://penangkaran.baliprov.dev/</a>
62	Sistem Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	<a href="https://anjababk.baliprov.dev/">https://anjababk.baliprov.dev/</a>
63	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali (Mobile)	Dapat diakses melalui aplikasi mobile melalui google play dan app store

c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali

Dengan era digital yang terus berkembang, peran teknologi informasi semakin menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah. Pusat data menjadi fondasi yang tak tergantikan dalam mengelola, menyimpan, dan menganalisis data secara efektif. Sebagai tulang punggung infrastruktur teknologi informasi, pusat data bukan sekadar tempat penyimpanan informasi, tetapi juga menjadi katalisator transformasi digital yang memberikan manfaat signifikan bagi pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik saat ini mengelola Pusat Data yang



berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi serta pusat penyaluran akses internet keseluruhan Perangkat Daerah Provinsi Bali. Pusat

Data juga memberikan layanan komputasi private cloud bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Layanan komputasi yang saat ini digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) tersebut berupa layanan virtual machine yang digunakan untuk menempatkan data, aplikasi dan website. Private cloud ini dibangun diatas perangkat keras HP Blade Server C7000 dengan jumlah server fisik sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total kapasitas terpasang :

vCPU : 128 core

(alokasi minus, tapi tidak digunakan secara penuh)

Memori : 768 GB (tersisa 300 GB)

Storage : 26 TB (tersisa 4TB)

Bandwidth : 4 Gbps

Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali pada saat ini belum memiliki backup server, sehingga apabila terjadi down pada Pusat Data maka aplikasi tidak bisa diakses oleh publik.

Disamping itu Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali juga kondisinya belum memenuhi standar Pusat Data Nasional sebagaimana amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan

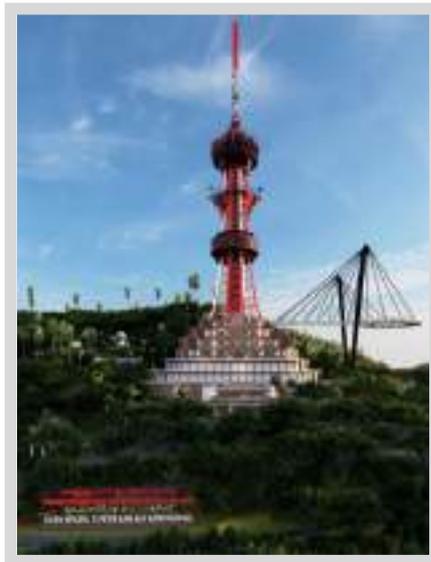


Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 32 ayat (2). Dalam rangka tetap memaksimalkan fungsi dari Pusat Data dan mencegah terjadinya gangguan, pada tahun 2023 dilakukan kegiatan pemeliharaan berupa penggantian peralatan/komponen server dan pemeliharaan genset untuk menjaga kestabilan cadangan daya listrik disaat terjadi pemadaman listrik dari PLN agar pelayanan pusat data tetap dapat berfungsi normal.

Dalam rangka digitalisasi birokrasi dan efisiensi, maka ke depan Perangkat Daerah diarahkan menggunakan layanan cloud server, jadi diperlukan perangkat pendukung untuk memaksimalkan kerja dalam memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah seperti personal komputer yang lebih canggih yang siap bekerja 24 jam untuk memantau Server Pusat Data.

d. Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali”

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi terpadu dan multi fungsi ini dilakukan untuk mengintegrasikan layanan-layanan



siaran TV digital terrestrial, telekomunikasi seluler, internet dan komunikasi radio komunitas, dalam wujud sebuah menara komunikasi bersama sekaligus sebagai destinasi pariwisata teknologi terpadu berbasis kearifan lokal Bali berupa Taman Teknologi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi

Bali” diharapkan akan menjadi pengungkit perekonomian Bali, dan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru.

Tahapan awal dalam pelaksanaan Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi ini yakni proses pembebasan lahan yang telah dilakukan sejak tahun anggaran 2022. Pada tahun 2023 dilakukan pembebasan beberapa bidang lahan yang akan digunakan sebagai fasilitas umum bangunan pendukung Taman Teknologi Komunikasi. Pembelian lahan ini berdasarkan pada nilai *appraisal* yang dikeluarkan oleh KJPP Ni Made Tjandra Kasih. Adapun besaran nilai penggantian

wajar masing-masing bidang lahan tersebut adalah sesuai dengan tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Data Pembebasan Lahan Tahun 2023

No	Uraian	Legalitas Tanah	Nilai Penggantian Wajar (Rp)
1	Fransiska Wulandari	SHM No. 258 dan 259	5.040.253.264
2	Ir. Ida Bagus Gede Udiyana	SHM No. 41 dan 39	3.540.863.210
3	I Nyoman Pariasa	SHM No. 166	1.281.003.795
TOTAL			9.862.120.269

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali” pada tahun 2023 terus dilanjutkan, sampai dengan akhir tahun 2023 besar capaian fisik pekerjaan telah mencapai 76,24%. Ruang lingkup pekerjaannya yaitu pelaksanaan pekerjaan struktur menara dan bangunan pelengkap serta pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP).



Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi dilakukan kerjasama dengan LPPM Universitas Mataram melalui pekerjaan Swakelola Manajemen Konstruksi. Swakelola Manajemen Konstruksi Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi bertujuan antara lain:

1. Dapat dicapai hasil perencanaan dan pelaksanaan konstruksi fisik Taman Teknologi Komunikasi yang sesuai dengan dokumen kontrak baik dari sisi kualitas, kuantitas

serta dapat diselesaikan dalam waktu dan biaya yang telah ditentukan; dan

2. Terwujudnya sistem manajerial (Manajemen Konstruksi) yang terkoordinasi antar disiplin ilmu didalam proses pembangunan konstruksi fisik, baik dalam proses pelaksanaan fisik konstruksi serta proses masa pemeliharaan melalui proses penerapan fungsi-fungsi Manajemen Konstruksi dan penempatan personil-personil yang sesuai dalam pelaksanaannya.

e. Layanan BKK Wifi Gratis

Pada tahun 2023 layanan BKK Wifi Gratis bagi Desa Adat, Objek Wisata, dan Puskesmas pada 2.150 titik layanan wifi untuk mendorong terpenuhinya penyediaan Infrastruktur dasar, berupa jaringan fiber optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi Bali untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur terintegrasi serta konektivitas antar-wilayah. Layanan Free Wifi tersebut dikecualikan untuk Kabupaten Badung, karena dilaksanakan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Badung. Data layanan BKK Free Wifi terinci sesuai tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Data Layanan BKK Free Wifi

NO	Kab./Kota	Lokasi Pemasangan				Jumlah Titik Wifi
		Puskesmas	Obyek Wisata	Desa Adat	Fasilitas Umum	
1	Denpasar	11	8	35	21	75
2	Gianyar	13	61	273	32	379
3	Bangli	12	38	168	43	261
4	Klungkung	9	17	122	28	176
5	Karangasem	12	15	190	73	290
6	Buleleng	20	25	170	111	326
7	Jembrana	10	15	64	73	162
8	Tabanan	20	24	349	88	481
9	Badung	Dilaksanakan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Badung				
JUMLAH		107	203	1.371	469	2.150

## 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah tidak terlepas dari adanya penyampaian informasi yang baik kepada masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Program-program kegiatan yang mendukung kebijakan pemerintah tentu harus tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh komponen masyarakat melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik, media luar ruang dan media online. Guna mengoptimalkan hubungan antara instansi pemerintah, media massa dan stakeholder lainnya serta mengoptimalkan penyebaran informasi program dan kebijakan pemerintah, maka berbagai upaya telah ditempuh sbb:



- a. Penyebarluasan Program Pemprov Bali Melalui Media Cetak, Media Televisi, Radio, Media Online, Media Sosial dan Konten Kreatif.



Fokus dan sasaran publikasi kegiatan Pemerintah Provinsi Bali bukan hanya terbatas pada masyarakat luas, tetapi juga pada para praktisi jurnalistik di media massa. Hal ini

mengingat semakin derasnya arus informasi yang memenuhi

ruang-ruang publik. Akibatnya, informasi yang diterima masyarakat menjadi semakin banyak dan beragam. Di sinilah pentingnya menjalin hubungan dengan pers, sehingga kualitas informasi yang bersumber dari media baik cetak, elektronik, maupun online dapat disampaikan secara akurat, tepat, dan dengan pemahaman yang benar. Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kerjasama dengan 18 Media Cetak, 49 Media Online, 4 Media Televisi dan 35 Media Radio. Data rincian kerjasama media ditampilkan sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10 Data Kerjasama Media Cetak

No	Media Cetak	No	Media Cetak
1	Nusa Bali	10	Bali Kini
2	Bali Post	11	Radar Bali
3	Pos Bali	12	Koran Metro
4	Warta Bali	13	Tabloit Metro
5	Fajar Bali	14	Nuansa Bali
6	Bali Ekpress	15	Media Bali
7	Bali Tribun	16	Tokoh
8	Tribun Bali	17	Denpost
9	Dialog	18	Bali Travel News

Tabel 3.11 Data Kerjasama Media Televisi

No	Media Televisi
1	PT. Cipta Megaswara Televisi
2	PT. Nirwana Media Televisi
3	PT. Bali Ranadha Televisi
4	PT. Bali Music Channel
5	TVRI Stasiun Bali

Tabel 3.12 Data Kerjasama Media Radio

No	Media Radio	No	Media Radio	No	Media Radio
1	PT. Radio Nuansa Giri	6	PT. Aneka Rama Ria	11	PT. Guntur IB 29
2	PT. Radio Singaraja	7	PT. Radio Balina Citra	12	PT. Radio Bali Perkasa
3	PT. Radio Bali Gema Mandiri	8	PT. Radio Gema Merdeka	13	PT. Radio Megantara Pratama
4	PT. Radio Bali Mandala Perkasa	9	PT. Radio Gema Sunari Indah	14	PT. Nur Dirgantara
5	PT. Radio Menara Tinggar	10	PT. Radio Pinguin	15	PT. Radio Besakih Rasisonia

No	Media Radio	No	Media Radio	No	Media Radio
16	PT. Radio Genta Swara Sakti	23	PT. Radio Plus	30	PT. Radio Swara Smarapura Shakti
17	PT. Radio Gema Satria Mandiri	24	PT. Radio Suara Denpasar Chakti	31	PT. Radio Baturiti Menaraswara
18	PT Radio Dunia Bokashi Raya	25	PT. Radio Swara Kreasi Utama	32	PT. Radio Suara Yudha
19	PT. Radio Swara Gunung Sari Fm	26	PT. Radio Sonata Indah	33	PT. Radio Gita Bakti Persada
20	PT. Radio Swara Negara	27	PT. Radio Swara Kini Jani	34	PT. Radio Swara Swarga
21	LPP RRI Singaraja	28	PT. Radio Barong	35	PT. Radio Berita Bagus Sejati
22	Radio Sanathana	29	Radio Masakini		

Tabel 3.13 Data Kerjasama Media *Online*

No	Media Online	No	Media Online	No	Media Online
1	PT. Media Bali Utama	18	PT. Mulya Adita Pancar	34	PT. Bali Puspa
2	PT. Suratani Bali Media	19	PT. Kirana Bali Media	35	PT. Poros Bali Mediatama
3	PT. Kawan Media Dewata	20	PT. Purnama Media Persada	36	Bali Ekonomi Bisnis
4	PT. Media Pelangi	21	PT. Diksi Merdeka	37	Rumah Media Nusantara
5	PT. Media Podium Utama	22	PT. Laksara Narataksu	38	PT. Kadasa Media Berjaya/Ig
6	Indonesia Ekpose	23	PT. Berita Bali Media	39	PT. Media Berita Dewata
7	PT. Media Kata Bali	24	PT. Krisna Redaksi Sembilan	40	PT. Media Bali Bersinar
8	PT. Serbi Media Utama	25	PT. Bali Pustaka Digital	41	PT. Media Kabar Nusa
9	PT. Mida Insan Cemerlang	26	Siung Amerta Mandiri	42	PT. Koranjuri Pandu Loka
10	PT. Nuswantara Karya	27	PT. Media Pers Indonesia Online	43	PT. Media Swara Gumi
11	PT. Cahaya Lentera	28	Jarrak Pos	44	PT. Media Pantau Bali
12	PT. Bali Top Media Jaya	29	PT. Bali Internasional Pers	45	PT. Loka Dewata Jaya
13	PT. Pilar Media Dekape	30	PT. Bali Global News	46	Update Bali
14	Prm Lkbn Antara Biro Bali	31	PT. Sinar Timur Berseri	47	PT. Tunas Media Bali
15	PT. Media Liputan Bali	32	PT. Patroli Lintas Gemilang	48	PT. Media Bali Netizen
16	PT. Bali Panca Mediatama	33	PT. Mata Dewata Gemilang	49	PT. Mega Surya Satriagana
17	Sinar Emas Garuda Sukses				

Kegiatan penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui media sosial Pemerintah Provinsi Bali dan konten-konten kreatif berupa iklan radio/TV, tayangan sosialisasi maupun media luar ruang seperti spanduk, banner, backdrop, baliho dan billboard disamping mendokumentasikan kegiatan pimpinan



dalam rangka pelaksanaan program pembangunan. Berkembangnya era digital saat ini, menuntut pemerintah daerah untuk mencari cara-cara menarik dalam mengemas informasi agar informasi-informasi khususnya mengenai program-program dan kebijakan pemerintah lebih menarik, mudah dipahami, relevan dan lebih cepat sampai ke masyarakat.

#### b. Pelayanan Informasi Publik

Layanan informasi publik dilaksanakan dalam rangka penyampaian program-program pembangunan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui kegiatan yang dilakukan pemerintah sekaligus masyarakat dapat memantau, mengawasi program-program tersebut. Pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dilaksanakan dengan 2 (dua) metode yakni secara offline (tatap muka langsung) dan online melalui alamat *website* <https://diskominfos.baliprov.go.id> dan melalui *email* [diskominfos@baliprov.go.id](mailto:diskominfos@baliprov.go.id). Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan

bahwa pemerintah memberikan jaminan untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan penyelenggaraan negara maupun ditingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Pemerintah Provinsi Bali menindaklanjuti implementasi dari Undang-Undang tersebut, dengan adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi serta menetapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Bali sedangkan Sekretaris di OPD sebagai PPID Pelaksana. Dalam rangka



meningkatkan kualitas layanan PPID, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali telah melakukan rapat koordinasi dengan

PPID Pelaksana secara rutin dan juga menyelenggarakan bimbingan teknis singkat terkait dengan keterbukaan informasi dari berbagai narasumber. Tahun 2023 kegiatan bimbingan teknis PPID telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali secara langsung dan melalui *Virtual Meeting*.

Dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali juga melaksanakan kegiatan Kolaborasi Bali Era Baru *Smart*

*Festival* yang bertempat di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan program-program Pemerintah Provinsi Bali yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan serta memberi ruang dan media kepada masyarakat umum, UMKM



dan IKM Binaan Pemerintah Provinsi Bali, serta binaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

c. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik untuk meningkatkan akselerasi pembangunan. Faktor lain dalam meningkatkan akselerasi pembangunan adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan penerapan digitalisasi. Di sisi lain, pemanfaatan

Teknologi Informasi yang semakin masif juga meningkatkan potensi ancaman penyebaran hoax, ujaran kebencian dan fitnah SARA yang apabila tidak diantisipasi dengan baik dapat mengganggu jalannya pembangunan dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melaksanakan kegiatan penguatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Bali, penguatan komunikasi publik melalui pengelolaan opini publik dan isu publik serta melakukan percepatan transformasi digital melalui literasi digital.

- Kegiatan penguatan pengelolaan opini publik dan isu publik pada tahun 2023 dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta pemantauan isu-isu publik di media massa, media online dan media sosial. Output yang dihasilkan berupa analisa isu dan berita yang menghasilkan rekomendasi terkait strategi komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat sekaligus sebagai bahan masukan untuk tindak lanjut maupun perencanaan program dan kegiatan pembangunan.
- Kegiatan penguatan melalui literasi digital pada tahun 2023 dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka dengan sasaran ASN, Non ASN dan seluruh masyarakat Bali ke seluruh Kabupaten/Kota se Bali serta melalui Lomba



Video Pendek Literasi Digital dengan fokus pada pilar "Etika Digital. Kegiatan literasi digital dilaksanakan tahun 2023 antara lain:

1. Melaksanakan Kegiatan Literasi Digital dengan anggaran sub kegiatan dengan peserta Perwakilan ASN dan Non ASN di Provinsi Bali Sebanyak 7 kali total peserta 750 orang;
2. Melaksanakan Kegiatan Literasi Digital bekerjasama dengan RTIK (narasumber) dan biro umum (penyedia snack) dengan peserta Siswa SMA dan SMK Negeri maupun Swasta di Provinsi Bali Sebanyak 47 kali total peserta 4.700 Orang;
3. Melaksanakan Kegiatan Literasi Digital bekerjasama dengan RTIK (narasumber) dan biro umum (penyedia snack) dengan peserta Masyarakat Umum di Provinsi Bali Sebanyak 12 kali total peserta 1.200 Orang;
4. Melaksanakan Kegiatan Literasi Digital dengan anggaran sub kegiatan dengan peserta Perwakilan Siswa SMA dan SMK Negeri maupun Swasta di Denpasar dan perwakilan organisasi wanita di Provinsi Bali Sebanyak 1 kali total peserta 350 orang.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali juga memberikan fasilitasi kepada Komisi Informasi Provinsi Bali.



Pelaksanaan fasilitasi dilaksanakan sepanjang tahun melalui dukungan administratif, kelembagaan dan keuangan. Dukungan administratif untuk

membantu pelaksanaan kegiatan sehari-hari khususnya penyelesaian sidang sengketa informasi. Dukungan kelembagaan dalam bentuk kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris. Dukungan keuangan diberikan dalam bentuk ketersediaan anggaran melalui DPA pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah. Pada tahun 2023, Komisi Informasi Provinsi Bali menyelenggarakan 2 kali sidang sengketa informasi dengan hasil 1 putusan dan 1 mediasi.

d. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Selama tahun 2023 kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Penguatan Pelayanan Sound System

Pelayanan sound system melalui satu unit mobil, lengkap dengan perangkat sound beserta tenaga operatornya, dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan pimpinan dan kegiatan perangkat daerah lainnya



- Pelaksanaan Forum Kehumasan Provinsi Bali diawali dengan pengumpulan data-data tentang isu-isu aktual dimasyarakat, dilanjutkan dengan analisis isu-isu, alternatif pemecahan masalah, dilanjutkan dengan sosialisasi pemecahan masalah melalui forum kehumasan

### 3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Urusan Persandian di Pemerintah Daerah merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun layanan yang perlu dilakukan sesuai kewenangan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan persandian adalah melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) dengan menyelenggarakan urusan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal.

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melalui Bidang Persandian pada tahun 2023 melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Analisa kebutuhan SDM persandian (Jabatan Fungsional Sandiman) dan Analisa kebutuhan sumber daya keamanan informasi lainnya serta pengelolaan SDM Persandian untuk peningkatan kompetensi melalui pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan BSSN atau pihak lain yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang berhubungan dengan pelaksanaan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan tahun 2023 yakni melalui Lentera Siber dengan konsep melibatkan peserta secara langsung berinteraksi serta menjadikan peserta sebagai target serangan siber dengan



harapan lebih tertanam kesadaran keamanan informasi/siber. Selanjutnya dalam mencegah infeksi *malware* di perangkat (komputer dan laptop) aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali serta untuk memudahkan monitoring keamanan perangkat dari *malware*, dilaksanakan pengadaan *antivirus* terpusat (*TrendMicro*)

b. Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)

Menyelenggarakan Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) untuk mendeteksi, menanggulangi dan memulihkan segala bentuk ancaman serangan cyber yang bertujuan



mengamankan informasi elektronik. CSIRT adalah sebuah tim yang dibentuk untuk melakukan usaha-usaha untuk memitigasi, memperbaiki dan atau mengembalikan sebuah

Sistem Elektronik ke kondisi normal. Pada Tanggal 5 Mei 2021 telah diresmikan Baliprov-CSIRT dengan anggota CSIRT adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Bali. Pada tahun 2023 terdapat beberapa insiden serangan siber yang berhasil ditangani antara lain:

1. Insiden sisipan halaman dan link situs perjudian pada:

- <https://sipp.baliprov.go.id/sipintar/togel-resmi/>
- <https://sipp.baliprov.go.id/assets/lk21/>
- <https://sipp.baliprov.go.id/assets/indoxxi>
- <https://sipp.baliprov.go.id/siep-v3/db/slot-gacor>
- <https://bpbd.baliprov.go.id>
- <https://jdih-dprd.baliprov.go.id>
- <https://balimelajah.baliprov.go.id>
- <https://siangsa.baliprov.go.id>

2. Insiden *deface website* pada:

- <https://layanandisdikpora.baliprov.go.id/e-kepeg/sekolah>
- <https://biropemkesra.baliprov.go.id>

c. Kontra Penginderaan

Melaksanakan kegiatan Kontra Penginderaan (KP), layanan Jammer yang bertujuan pengamanan informasi non elektronik Kontra Penginderaan adalah analisa pemindaian frekuensi dan pemeriksaan barang elektronik untuk menghindari terjadinya penyadapan yang dapat berpotensi menjadi sumber kebocoran informasi. Tahun 2023 kegiatan ini dilakukan dengan melakukan fasilitasi kegiatan pengacakan sinyal (jammer) pada saat kunjungan kepala negara.

d. Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Sertifikat Elektronik (SE) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik. Sampai dengan saat ini pemegang Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah Sekretaris Daerah, Eselon II, KaUPTD, Sekretaris, Pejabat Keuangan yang menangani dana dekon dan Ka SMAN, SMKN dan SLBN di lingkup Pemprov Bali. Pemberlakuan Tanda Tangan Elektronik (TTE) merupakan salah satu upaya untuk mengamankan informasi elektronik.

e. Memfasilitasi Vulnerability Assessment (VA)/IT Security Assesment (ITSA)

ITSA adalah pengujian yang dilakukan pada sebuah aplikasi elektronik (software) dalam tahapan testing (sebelum aplikasi diluncurkan) dengan tujuan untuk menemukan celah kerentanan keamanan sehingga tidak menjadi sumber permasalahan dikemudian hari. Aplikasi yang dilakukan

untuk melakukan pengujian antara lain: *Kali Linux*, *OWASP ZAP*, *BurpSuite* dan *Pentest Tool*. Sebelumnya VA/ITSA dilakukan oleh BSSN dengan kuota 3 aplikasi per Tahun. Sejak tahun 2023 kegiatan VA/ITSA sudah dapat dilakukan secara mandiri oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

f. Pengelolaan *Secure Email* SANAPATI dan *Selection*

Pengelolaan *email* SANAPATI dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 41/03-E/HK/2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana E-Mail Sanapati pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. *Email* SANAPATI adalah surat elektronik (*email*) yang menggunakan jalur komunikasi tertutup dan memiliki proteksi terhadap *spam*, *fake mail*, *phising* dan *email bombing*. *Email* SANAPATI digunakan sebagai media kirim terima informasi yang aman dalam kerangka Jaring Komunikasi Sandi internal dan antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan *SELECTION (Secure File Encryption)* merupakan *tool* untuk *enkripsi/dekripsi file* yang berbasis sistem operasi *windows* dan memiliki fitur autentikasi lisensi mandiri serta penerapan aspek kriptografis pada fitur keamanannya.

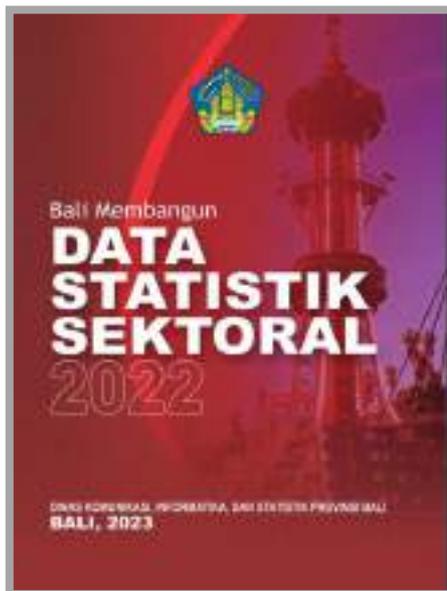
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 31 mengisyaratkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengimplementasikan hal tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi

Bali telah membangun Bali Satu Data yang merupakan portal resmi data terbuka Provinsi Bali yang dirancang sebagai inovasi berkelanjutan dari perbaikan tata Kelola Data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik serta mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia mengamanatkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki tugas sebagai Walidata untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data statistik sektoral melalui Portal Satu Data. Pengguna data tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai Pembina Data yang berguna untuk perencanaan pembangunan saat ini dan selanjutnya.

Sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, maka tahun 2023 telah disusun Buku Bali



Membangun Tahun 2022 yang menyajikan data-data statistik sektoral. Buku ini dipublikasikan secara rutin setiap tahun yang menyajikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data dan informasi, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja

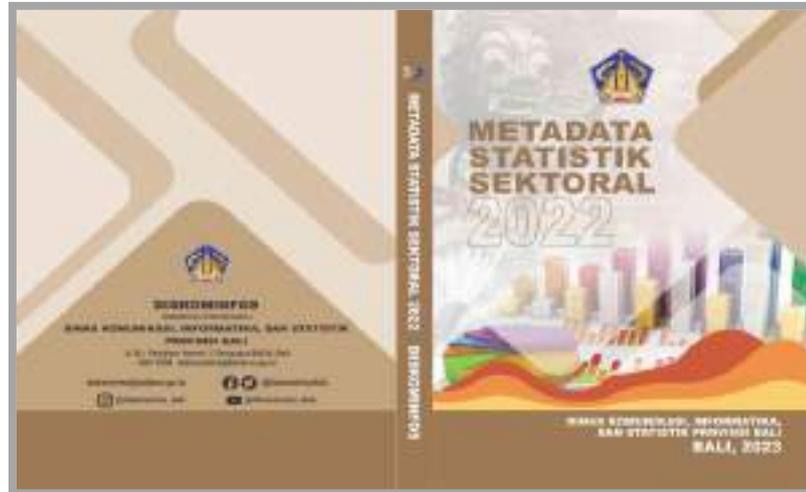
kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia juga menyatakan bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data wajib untuk memenuhi kaedah- kaedah Satu Data

Indonesia (SDI) yang meliputi : Standart Data, Metadata, Interoporabilitas/dibagipakaikan dan kode refrensi. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Kebijakan yang akan diimplementasikan kepada masyarakat dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel wajib didasarkan pada data dan informasi. Untuk menyajikan data dan informasi tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melalui Bidang Statistik pada tahun 2023 telah menyusun Buku Metadata Statistik Sektoral Tahun 2022. Tahapan dalam penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral 2022 adalah:

- Penyusunan Keanggotaan Panitia, Narasumber, dan Moderator Focus Group Discussion(FGD) Peran Standart Data dan Metadata Statistik dalam peningkatan kualitas statistik sektoral pada tanggal 21-22 Maret 2023. Tim moderator dan Narasumber yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Instansi Vertikal/Badan/Lembaga terkait di Provinsi Bali ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 281/03-E/HK/2023, Tanggal 27 Pebruari 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia, Narasumber,dan Moderator Focus Group Discussion Pada Penyelenggaraan Membangun Metadata Statistik Sektoral di Daerah;
- Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) dan disahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor B.24.015/401/STAT/D.KOMINFOS Tanggal 6 Januari 2023;
- Pengisian formulir metadata dan penginputan metadata melalui aplikasi <https://datasektoral.baliprov.go.id/>;

- Validasi dan Verifikasi data; dan
- Pencetakan Dokumen Hasil yaitu Buku Metadata Statistik Sektoral.



Analisa singkat terhadap keberhasilan target disajikan pada tabel 3.14 sebagai berikut.

Tabel 3.14 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Tahun 2023			Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Komunikasi Dan Informasi Publik Yang Efektif Dan Efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	4,07	135,67	Target Terlampaui	
a.	Terwujudnya pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas						
		Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik	25 Aplikasi	25 Aplikasi	100	Target Tercapai	

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Tahun 2023			Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	5	6	7	8	9
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93,2	94,32	101,20	Target Terlampaui	
		Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	81	81	100	Target Tercapai	
		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82,50	*)	*)		
		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 Dokumen	16 Dokumen	100	Target Tercapai	
		Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 Dokumen	75 Dokumen	100	Target Tercapai	
		Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100	Target Tercapai	

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Tahun 2023			Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	5	6	7	8	9
		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	3 Paket	3 Paket	100	Target Tercapai	
		Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100	Target Tercapai	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	539 Unit	539 Unit	100	Target Tercapai	
b.	Meningkatnya ketersediaan data statistik yang berkualitas.	Persentase data statistik sektoral yang valid	100	100	100	Target Tercapai	

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Tahun 2023			Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	5	6	7	8	9
		Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	11 Sektor	11 Sektor	100	Target Tercapai	
c.	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase keamanan transaksi data dan informasi publik	100	100	100	Target Tercapai	
		Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	38 OPD	38 OPD	100	Target Tercapai	
		Jumlah entitas jaringan komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	38 OPD	38 OPD	100	Target Tercapai	

Keterangan: \*) penilaian dilakukan tahun 2024

### **3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tahun 2023 adalah 100% untuk realisasi fisik dan 47,06% untuk realisasi keuangan, maka terjadi efisiensi keuangan sebesar 52,94%. Tingginya nilai efisiensi anggaran merupakan dampak dari kebijakan rasionalisasi dan efisiensi anggaran. Data efisiensi penggunaan sumberdaya diuraikan pada tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel 3.15 Data Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang berkualitas								
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Indeks Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>93,2</b>	<b>94,32</b>	<b>101,20%</b>	<b>40.009.778.752</b>	<b>33.035.724.972</b>	<b>82,57%</b>	<b>17,43%</b>
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	81	81	100%	40.009.778.752	33.035.724.972	82,57%	17,43%
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>	<b>3</b>	<b>4,07</b>	<b>135,67%</b>	<b>408.375.273.985</b>	<b>167.310.580.080</b>	<b>40,97%</b>	<b>59,03%</b>

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik	25 Aplikasi	25 Aplikasi	100%	408.375.273.985	167.310.580.080	40,97%	59,03%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>82.50</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>	<b>19.887.473.021</b>	<b>19.547.140.075</b>	<b>98,29%</b>	<b>1,71%</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	29.990.400	19.709.800	65,72%	34,28%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 Dokumen	75 Dokumen	100%	15.017.847.325	14.924.368.969	99,38%	0,62%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100%	604.124.400	576.594.129	95,44%	4,56%

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Paket	3 Paket	100%	85.410.800	85.000.000	99,52%	0,48%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	486.989.000	433.797.470	89,08%	10,92%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	539 Unit	539 Unit	100%	3.663.111.096	3.507.669.707	95,76%	4,24%

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik yang berkualitas</b>								
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Data Statistik Sektoral Yang Valid</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>773.875.680</b>	<b>604.631.959</b>	<b>78,13%</b>	<b>21,87%</b>
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	11 sektor	11 sektor	100%	773.875.680	604.631.959	78,13%	21,87%
	<b>Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah</b>								
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.154.942.992</b>	<b>774.071.707</b>	<b>67,02%</b>	<b>32,98%</b>

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	38 OPD	38 OPD	100%	670.412.096	466.443.161	69,58%	30,42%
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaringan komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	38 OPD	38 OPD	100%	484.530.896	307.628.546	63,49%	36,51%
						<b>470.201.344.430</b>	<b>221.272.148.793</b>	<b>47,06%</b>	<b>52,94%</b>

Keterangan: \*) penilaian dilakukan tahun 2024

### 3.4 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.16 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3		7	8	9	10
	<b>TERWUJUDNYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN</b>						
1	Terwujudnya pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	101,20%	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	101,20%	Menunjang
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	100%	Menunjang
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten yang perencanaan media komunikasi public	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3		7	8	9	10
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	100%	Menunjang
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	100%	Menunjang
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	100%	Menunjang
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program/kebijakan	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3		7	8	9	10
		<b>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>	<b>135,67%</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>	<b>135,67%</b>	Menunjang
				<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik</b>	<b>100%</b>	Menunjang
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	100%	Menunjang
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3		7	8	9	10
		Nilai evaluasi manajemen kinerja	*)	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	*)	<b>Menunjang</b>
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3		7	8	9	10
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	Menunjang
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3		7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	98,6%	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	Menunjang
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3		7	8	9	10
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	100%	Menunjang
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	100%	Menunjang
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3		7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3		7	8	9	10
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	Menunjang
<b>2</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan data statistik yang berkualitas.</b>	<b>Persentase data statistik sektoral yang valid</b>	<b>100%</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Data Statistik Sektoral Yang Valid</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3		7	8	9	10
				Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun	100%	Menunjang
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah</b>	<b>Persentase keamanan transaksi data dan informasi</b>	<b>100%</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3		7	8	9	10
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100%	Menunjang
				<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	100%	Menunjang

Keterangan: \*) penilaian dilakukan tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.16, capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ditunjang oleh beberapa program sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Program ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang program pembangunan di Provinsi Bali serta meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan indikator kinerja yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Capaian tahun 2023 sebesar 101,20% dari target, dengan nilai indeks 94,32 dari target sebesar 93,20.
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran operasional perangkat infrastruktur dan jaringan e-government, menjamin kesiapan operasional perangkat infrastruktur dan jaringan e-government dan memperpanjang waktu penggunaan perangkat infrastruktur dan jaringan e-Government. Program ini juga bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi/Aplikasi sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur melalui pemanfaatan sistem informasi. Indikator kinerja program adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan capaian tahun 2023 sebesar 135,67 persen dari target yakni sebesar 4,07 indeks dari target sebesar 3 indeks.
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini bertujuan untuk melakukan pencatatan data dan informasi yang terstruktur yang akan mendukung proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Program ini menjadi dasar untuk melakukan penyusunan analisa statistik sektoral yang mencakup 11 sektor yaitu sosial, budaya, ekonomi, politik,

hukum dan HAM, yang akan dipublikasi secara luas. Indikator kinerja program adalah Persentase data statistik sektoral yang valid dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

- d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Program ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan transaksi data dan informasi antar lembaga serta pelaksanaan kegiatan maupun administrasi perkantoran. Program ini memberikan standarisasi keamanan data, sehingga informasi pelaksanaan administrasi perkantoran bisa terlaksana secara lancar. Indikator kinerja program adalah Persentase keamanan transaksi data dan informasi dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

### **3.5 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali**

Pagu anggaran Tahun 2023 semula sebesar Rp 456.408.214.643 dan beberapa kegiatan mendapatkan tambahan anggaran dalam rangka mendukung program prioritas, sehingga menjadi Rp 470.201.344.430 (bertambah sebesar Rp 13.793.129.787). Penyesuaian terjadi pada kegiatan:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari pagu semula sebesar Rp 14.782.929.713 menjadi Rp 15.017.847.325 (bertambah Rp 234.917.612)
2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah dari pagu semula sebesar Rp 3.658.638.696 menjadi Rp 3.663.111.096 (bertambah Rp 4.472.400)
3. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik bertambah sebesar Rp 13.553.941.672 dari alokasi pagu awal Rp 26.455.837.080 menjadi Rp 40.009.778.752

4. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi berkurang sebesar Rp 594.433 dari alokasi pagu awal Rp 408.375.868.418 menjadi Rp 408.375.273.985
5. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi bertambah sebesar Rp 364.240 dari alokasi pagu awal Rp 773.511.440 menjadi Rp 773.875.680
6. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi bertambah sebesar Rp 89.048 dari alokasi pagu awal Rp 670.323.048 menjadi Rp 670.412.096
7. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi berkurang sebesar Rp 60.752 dari alokasi pagu awal Rp 484.591.648 menjadi Rp 484.530.896.

Realisasi anggaran tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali diuraikan sesuai tabel 3.17 sebagai berikut:

Tabel 3.17 Rincian Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>40.009.778.752</b>	<b>33.035.724.972</b>	<b>82,57%</b>
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	40.009.778.752	33.035.724.972	82,57%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>408.375.273.985</b>	<b>167.310.580.080</b>	<b>40,97%</b>
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	408.375.273.985	167.310.580.080	40,97%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>19.887.473.021</b>	<b>19.547.140.075</b>	<b>98,29%</b>

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.990.400	19.709.800	65,72%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.017.847.325	14.924.368.969	99,38%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	604.124.400	576.594.129	95,44%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.410.800	85.000.000	99,52%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.989.000	433.797.470	89,08%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.663.111.096	3.507.669.707	95,76%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>773.875.680</b>	<b>604.631.959</b>	<b>78,13%</b>
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	773.875.680	604.631.959	78,13%
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>1.154.942.992</b>	<b>774.071.707</b>	<b>67,02%</b>
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	670.412.096	466.443.161	69,58%
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	484.530.896	307.628.546	63,49%
	<b>TOTAL</b>	<b>470.201.344.430</b>	<b>221.272.148.793</b>	<b>47,06%</b>

### **3.6 Inovasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali**

Beberapa inovasi yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam pelayanan kepada Perangkat Daerah dan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pengarsipan dokumentasi foto dan video kegiatan pimpinan dilakukan dengan *synology* maupun *google drive* sehingga bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan dan bisa diakses dari mana saja;
2. Pembuatan Konten Media Sosial untuk kegiatan-kegiatan pimpinan yang dapat disebarluaskan melalui *platform Facebook, Instagram* dan *TikTok*;
3. Proses editing *on the spot* atau segera melakukan editing video kegiatan pimpinan di tempat acara setelah mendapat bahan video *footage, insert* dan *stockshot*;
4. Penambahan fitur Pelacakan Permohonan atau *Tracking ID* pada *website* Bali Satu Data dimana pemohon informasi dapat melacak *progress* tindak lanjut dari permohonannya;
5. Melaksanakan kegiatan Kolaborasi Bali Era Baru *Smart Festival* yang bertujuan untuk mempromosikan program-program Pemerintah Provinsi Bali yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan serta memberi ruang dan media kepada masyarakat umum, UMKM dan IKM Binaan Pemerintah Provinsi Bali, serta binaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali;
6. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi terpadu dan multi fungsi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali”;
7. Pengembangan berbagai aplikasi dalam rangka mendukung Ekonomi Kerthi Bali (Love Bali, Portal Satu Pintu Pariwisata Bali, Sigapura, Neraca Pangan, Silebah, Simpelkan, Sistem

Pendataan UMKM/IKM dan Koperasi, Aplikasi Made in Bali, VR Pulaki Tour dan Pameran 360 UMKM Bali Bangkit);

8. Pengembangan aplikasi Layanan Publik Digital (Bali Media centre, Bali Satu Data, Kantor Virtual Publik, Sisnaker, EvenID, Antrean dan Riwayat Kesehatan, Sikuat, Aplikasi Jidhat, dan Sensus Desa Adat);
9. Melaksanakan program Lentera Siber dengan konsep melibatkan peserta secara langsung berinteraksi serta menjadikan peserta sebagai target serangan siber dengan harapan lebih tertanam kesadaran keamanan informasi/siber;
10. Menyelenggarakan *Bug Bounty Competition* yang merupakan program untuk mencari celah kerentanan dalam suatu sistem elektronik dengan cakupan peserta secara nasional;
11. Melakukan publikasi data Buku Bali Membangun melalui portal Bali Satu Data;
12. Pengembangan Pusat Data dengan model penerapan *hybrid* (*Cloud Server + On Premises*) untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan tugas Diskominfos maka ditetapkan Motto:



13. Memberikan layanan wifi gratis di wantilan desa adat, puskesmas dan daerah pariwisata tersebar di 8 Kabupaten/ Kota dalam rangka menunjang *Bali Smart Island*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Tinjauan Umum Keberhasilan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2023 memiliki peran sebagai alat kendali dalam upaya pengelolaan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah serta menjadi instrumen utama untuk memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja serta efektivitas kebijakan yang diterapkan. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali kepada masyarakat. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diharapkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali tahun 2023 dengan kualitas pelaksanaan baik dan perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik hingga tahun-tahun berikutnya.

Secara umum pencapaian sasaran strategis Tahun 2023 sesuai tugas pokok, fungsi dan misi yang diemban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali telah berhasil, hal tersebut tercermin dari pencapaian sasaran strategis sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

#### **4.2 Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja**

1. Kondisi Pusat Data/Data Center Provinsi Bali saat ini belum memenuhi Standar Tier III dan belum adanya Pusat Data Cadangan/ *disaster recovery center* dan *command center*;
2. Struktur Topologi jaringan lokal di setiap perangkat daerah yang belum optimal dan terstruktur serta belum adanya manajemen *bandwidth* di masing-masing Perangkat Daerah;

3. Penyelenggaraan dalam setiap aspek SPBE belum termuat sepenuhnya dalam dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
4. Kualitas SDM bidang IT masih relatif rendah dan kurangnya tenaga sandiman serta minimnya Alat Pendukung Utama (APU) persandian menyebabkan pelayanan dibidang IT dan keamanan informasi belum maksimal.
5. Sulitnya menyusun jadwal peliputan akibat padatnya kegiatan pimpinan baik volume dan waktu;
6. Minimnya masyarakat dalam mencari sebuah informasi publik mengindikasikan bahwa keberadaan PPID Provinsi Bali masih belum dikenal masyarakat secara luas.
7. Belum terbentuknya PPID Komisi Informasi Provinsi Bali yang diakibatkan belum ditunjuknya secara definitif Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Bali
8. Dalam rangka pembangunan Taman Teknologi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali”, masih terdapat beberapa lahan di area pembangunan yang perlu dibebaskan guna mendukung konstruksi serta adanya faktor cuaca yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan *supply* material.

Upaya Penyelesaian:

1. Melakukan Standarisasi dan *Assessment* Topologi Jaringan Intranet di setiap perangkat daerah;
2. Melakukan Perluasan dan Penguatan Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik;
3. Dalam rangka digitalisasi birokrasi dan efisiensi, maka perangkat daerah diarahkan menggunakan layanan cloud server dengan demikian pengadaan server baru tidak ada di masing-masing perangkat daerah dan selanjutnya terpusat menggunakan layanan cloud server. Untuk lebih memaksimalkan layanan pusat

- data, dilakukan pemeliharaan dan peremajaan peralatan jaringan pada Pusat Data;
4. Melakukan rekrutmen tenaga IT dan Mengusulkan pelatihan / bimtek SDM bidang IT serta bimtek tenaga sandiman;
  5. Melakukan sosialisasi secara lebih luas ke masyarakat terkait peranan PPID dan melakukan bimbingan teknis PPID;
  6. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara lebih intens dengan pemilik lahan agar proses pembebasan lahan lebih cepat terselesaikan
  7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pekerjaan pembangunan Taman Teknologi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali” agar dapat selesai sesuai target.

#### **4.3 Saran Dan Rekomendasi Saran**

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sesuai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian memiliki peranan strategis dalam mendukung mewujudkan visi Kepala Daerah khususnya dukungan teknologi, informasi dan komunikasi. Untuk itu program-program bidang Komunikasi dan informasi perlu mendapat alokasi anggaran yang proposional, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan dll, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal

##### **Rekomendasi**

Agar peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat optimal dalam fungsinya sebagai penyebarluasan informasi baik melalui media yang bersifat konvensional/tradisional maupun secara online dengan dukungan TIK, maka diperlukan rekomendasi antara lain:

- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat menjadi rujukan bagi OPD kabupaten/kota;
- Diperlukan dukungan secara input yang meliputi anggaran yang memadai, jumlah sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai;
- Mendorong OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali maupun di kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan transparansi informasi di era keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali pada periode mendatang.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Penjelasan (alasan)	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
<b>TERWUJUDNYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN</b>	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Domain dan Aspek Penilaian : Domain 1: Kebijakan Internal SPBE dengan total bobot 17%. Domain2: Tata kelola SPBE dengan total bobot 28% Domain3: Layanan SPBE dengan total bobot 55%.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Indeks SPBE tersebut didukung oleh tiga sasaran strategis pada tiga urusan yang diemban (komunikasi, informatika, statistik dan persandian).
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayan informasi	Tingkat kepuasan diperoleh dari kuesioner yang disampaikan kepada masyarakat.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.</li> <li>2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.</li> <li>3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.</li> </ol>
Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase keamanan transaksi data dan informasi	Jumlah transaksi data dan informasi yang diamankan dibagi dengan jumlah transaksi data dan informasi yang ada x 100%	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
Meningkatnya ketersediaan data statistik yang berkualitas.	Persentase data statistik sektoral yang valid	Jumlah data statistik sektoral yang valid dibagi data yang tersedia x 100%	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali,



**GEDE PRAMANA**  
NIP. 19630531 199703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**ESELON II: KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Satuan
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan dan penyebarluasan informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93,20	Indeks
2	Terwujudnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	Indeks
3	Terwujudnya keamanan informasi pemerintah	Persentase keamanan transaksi data dan informasi publik	100	Persen
4	Terwujudnya ketersediaan dokumen statistik yang berkualitas	Persentase data statistik sektoral yang valid	100	Persen
5	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82,50	Nilai Angka

No	Program	Anggaran (Rp).	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19,648,083,009	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	26,455,837,080	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	408,375,868,418	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	773,511,440	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1,154,914,896	APBD
	<b>Total</b>	<b>456,408,214,643</b>	-

Bali, 2 Januari 2023

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI BALI

**GEDE PRAMANA**

NIP. 19600531 199703 1 002

Pihak Kedua  
GUBERNUR BALI

**WAYAN KOSTER**





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**ESELON III: SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI BALI**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Bagian
Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang komunikasi, Informatika, statistik dan persandian	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.5	Sekretariat

No	Indikator	Program	Sumber Anggaran (Rp).			Jumlah
			APBD	APBN	Lain	
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	<b>Program:</b>				
		<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Rp 19,648,083,009	-	-	Rp 19,648,083,009
		<b>Kegiatan:</b>				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 29,990,400	-	-	Rp 29,990,400
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 14,782,929,713	-	-	Rp 14,782,929,713
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 604,124,400	-	-	Rp 604,124,400
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp 85,410,800	-	-	Rp 85,410,800
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp 486,989,000	-	-	Rp 486,989,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 3,658,638,696	-	-	Rp 3,658,638,696
		<b>Total</b>	Rp 19,648,083,009	-	-	Rp 19,648,083,009

Bali, 2 Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama



**GEDE PRAMANA**  
NIP. 19680531 199703 1 002



**Drs. I Dewa Ketut Rai Rustina, M. Si.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680531 199703 1 002



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I GEDE AGUS ARJAWA TANGKAS,SH.M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Gede Pramana, ST. MT.  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali  
Selaku atasan **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Gede Pramana,  
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 2 Januari 2023  
**Pihak Pertama,**

I Gede Agus Arjawa Tangkas,SH.M.Si  
NIP.19720822 199203 1 006

Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika  
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Bagian
Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi TIK	1. Meningkatnya Persentase OPD yang terlayani infrastruktur TIK	100 %	Infrastruktur dan Aplikasi Informatika
	2. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pada OPD, SMA/SMK dan UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	100 %	
	3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE )	100 %	

Indikator	Program Kegiatan	Sumber Anggaran (Rp)			Jumlah (Rp)
		APBD	APBN	Lainnya	
Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi TIK	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan: 1. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp 381.256.875,549	-		Rp408.375.868.418
	2. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Rp 15.848.234.821	-		
	3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 11.270.758.048	-		



Bali, 2 Januari 2023  
**Pihak Pertama,**

  
I Gede Agus Arjawa Tangkas, SH, M.Si  
NIP. 19720822 199203 1 006



பிணக்குறுபுரமிக்குமி காலி

PEMERINTAH PROVINSI BALI

කිසකි ශකපුකිකසිකි පුකුකසවසනික කකි සුනිසුකි

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

කකි ශකපුකිකසිකි පුකුකසවසනික කකි සුනිසුකි (සකුකුකු) කකි ශකපුකිකසිකි (සකුකුකු) පුකුකසවසනික

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

website : www.diskominfos.baliprov.go.id , email : diskominfos@baliprov.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BIDANG PERSANDIAN  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Putu Sundika, ST., MT  
Jabatan : Kepala Bidang Persandian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Gede Pramana  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

  
Gede Pramana  
NIP. 19580531 199703 1 002

Bali, 2 Januari 2023  
PIHAK PERTAMA,

  
I Putu Sundika, ST., MT  
Pembina  
NIP. 19761226 200604 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BIDANG PERSANDIAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Bagian
Meningkatnya keamanan transaksi data dan informasi publik	Persentase keamanan transaksi data dan informasi publik	100%	Persandian

Indikator	Program/Kegiatan	Sumber Anggaran (Rp.)			Jumlah
		APBD	APBN	LAIN	
Persentase keamanan transaksi data dan informasi publik	Program : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1,154,914,696	-	-	1,154,914,696
	Kegiatan:				
	1 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	484,591,648	-	-	484,591,648
	Sub kegiatan :				
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	484,591,648	-	-	484,591,648
	Kegiatan:				
	2 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	670,323,048	-	-	670,323,048
	Sub kegiatan :				
	1 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	338,188,048	-	-	338,188,048
	2 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	332,135,000	-	-	332,135,000
Total		1,154,914,696			1,154,914,696

PIHAK KEDUA,



Gede Pramana  
NIP. 19650531 199703 1 002

Bali, 2 Januari 2023  
PIHAK PERTAMA



I Putu Sundika, ST, MT  
Pembina  
NIP. 19761226 200604 1 003



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BIDANG STATISTIK TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. I Dewa Ketut Rai Rustina, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Gede Pramana, S.T., M.T  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Gede Pramana  
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 02 Januari 2023

PIHAK PERTAMA,

Drs. I Dewa Ketut Rai Rustina, M.Si.  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19660918 199803 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ESELON III : KEPALA BIDANG STATISTIK PADA DINAS KOMUNIKASI,**  
**INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Bagian
Meningkatnya ketersediaan data statistik yang berkualitas	Persentase data statistik sektoral yang valid	100 %	Statistik
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	
	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	
	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	

Indikator	Program/ Kegiatan	Sumber Anggaran			Jumlah
		APBD	APBN	Lain	
	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	Rp. 773,511,440	-	-	Rp. 773,511,440
Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dianalisa dan diseminasi	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Rp. 773,511,440	-	-	Rp. 773,511,440
1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	<b>Sub Kegiatan</b> 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp. 211,129,848	-	-	Rp. 211,129,848
2) Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	2) Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp. 189,411,396	-	-	Rp. 189,411,396
3) Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun	3) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di daerah	Rp. 146,791,196	-	-	Rp. 146,791,196
	<b>Total</b>	<b>Rp. 773,511,440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp. 773,511,440</b>

PIHAK KEDUA,



**Gede Pramana**  
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 02 Januari 2023

PIHAK PERTAMA,



**Drs. I Dewa Ketut Rai Rustina, M.Si**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19660918 199803 1 003



ບົດບັນຍັດ ກຽມບົດບັນຍັດ ຕາມ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ຂົດສົງຄາມຍຸດສາສະໜາ ທຸກໆລະດັບຂົດສົງຄາມ ຂາດສົງຄາມສົງຄາມ  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
ຄະນະສົງຄາມຍຸດສາສະໜາ ທຸກໆລະດັບຂົດສົງຄາມ (ປະຕູສູງ) ຕາມ ກຽມບົດບັນຍັດ (ວັດສະດຸ) ກຽມບົດບັນຍັດ  
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859  
website : www.diskominfos.baliprov.go.id , email : diskominfos@baliprov.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, SE.,M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir.Gede Pramana.ST.,MT  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 21 Pebruari 2023

**PIHAK PERTAMA**



Ir. Gede Pramana,ST.,MT  
NIP.19680531 199703 1 002

Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, SE.,M.Si  
NIP.19790924 200803 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**  
**PROVINSI BALI**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Bagian/Bidang
Meningkatnya Kualitas pengelolaan dan penyebarluasan Informasi	Indek Keterbukaan Informasi Publik	93.20	Informasi dan Komunikasi Publik

No.	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Anggaran (RP)			Jumlah
			APBD	BPBN	Lain	
1	Indek Keterbukaan Informasi Publik	Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.9.968.937.608	-	-	Rp.9.968.937.608
		Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Bali	Rp.9.968.937.608	-	-	Rp.9.968.937.608
		Sub Kegiatan : Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Daerah	Rp.2.161.173.676	-	-	Rp.2.161.173.676
		Layanan Informasi Publik	Rp.4.568.893.276	-	-	Rp.4.568.893.276
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp.3.238.870.656	-	-	Rp. 3.238.870.656
		Total	Rp.9.968.937.608			Rp.9.968.937.608

Bali, 21 Pebruari 2023

Pihak Pertama

**Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, SE., M.Si**  
NIP. 19790924 200803 1 001



Pihak Kedua

**Ir. Gede Pramana, ST., MT**  
NIP. 19680531 199703 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

### ESELON IV: KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Bagian
1	Meningkatnya layanan administrasi umum dan kepegawaian	1. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	1 Dokumen	Sekretariat
		2. Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen	12 Bulan	
2	Meningkatnya layanan Administrasi Barang Jasa dan Ansp sesuai ketentuan	1. Jumlah dokumen barang dan jasa yang sesuai aturan	1 Dokumen	
		2. Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen barang dan jasa	12 Bulan	

No	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Anggaran			Jumlah
			APBD	APBN	Lain	
		Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
1		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.244.600			5.244.600
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor yang siap pakai	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	254.892.500			254.892.500
	Tersedianya sesajen sehari hari dan piadalan	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.500.000			87.500.000
	Jumlah dokumen dan spanduk yang dicetak dan digunakan	Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	22.247.300			22.247.300
	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap edar	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundangan	39.900.000			39.900.000
	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat rapat koordinasi,konsultasi, seminar, bintek dan pameran yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.340.000			194.340.000
2		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai	Sub Kegiatan : Pengadaan mebel	28.160.000			28.160.000
		Sub Kegiatan : Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.250.800			57.250.800

		Kegiatan: Penyediaan Jasa Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Tersedianya jaringan komunikasi dan sumber daya air serta listrik pada bangunan gedung kantor	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.634.000		348.634.000
	Jumlah materai yang tersedian siap pakai	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.355.000		3.355.000
	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan Gedung kantor	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.000.000		135.000.000
3		Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara dan siap pakai	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.848.366.568		1.848.366.568
	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara dan Siap pakai	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	7.120.000		7.120.000
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.890.000		172.890.000
		Sub. Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111.110.000		111.110.000



**PIHAK KEDUA,**  
Drs. I Dewa Ketut Rai Rustina, M.Si.  
 Pembina Tk.I (IV/b)  
 NIP. 19660918 199803 1 003

Denpasar, 2 Januari 2023  
**PIHAK PERTAMA,**

Ida Ayu Kade Megawati, SE  
 Penata Tingkat I (III/d)  
 NIP. 19640808 198403 1 003